BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR : 5 TAHUN 2016

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatan roda Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. Perlu adanya dukungan alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe;

b. bahwa untuk tertibnya administrasi pengelolaan keuangan desa, maka perlu adanya petunjuk teknis tentang pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa dengan Peraturan Bupati ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang tata Cara dan Persyaratan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah drubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 08 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 72 Tahun 2009);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 33 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 168);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Peneyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

17. Kepala Urusan adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dan sekretaris Desa berdasarkan pembagian urusan di bidang Pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
18. Kepala Dusun bagian dari kerja Kepala Desa dan merupakan Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
19. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
20. Kampung perisai adalah salah satu grand strategy program pemerintah Kabupaten Konawe yang tertuang dalam Rencana Pembengunan Jangka Menengah Kabupaten Konawe Tahun 2013 - 2018 untuk pembangunan di desa.
21. Desa penerima Dana Desa adalah Desa - Desa dalam wilayah Kabupaten Konawe yang telah ditetapkan sebagai penerima dana desa yang bersumber dari Anggaran Penelitian dan Belanja Negara (APBN);
22. Desa Non dana desa adalah desa yang belum mendapatkan dana desa yang bersumber dari Anggaran Penelitian dan Belanja Negara (APBN);

BAB II
ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

(1) Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan kepada Desa definitif adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 33 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016.
(2) ADD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe dipergunakan untuk Belanja Desa yang meliputi Belanja Kegiatan pembangunan, pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Belanja Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Daftar Desa penerima dan rincian besaran Alokasi Dana Desa (ADD) masing-masing serta Biaya Penunjang Kegiatan lainnya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
(2) Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh ADD direncanakan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat di Desa.
(3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai ketentuan pengelolaan anggaran yang dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB III
KELEMBAGAAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

(1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa yang terdiri dari unsur Perangkat Desa dan unsur Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2) Susunan Tim Pelaksana Desa terdiri atas :
- Penanggung Jawab : Kepala Desa.

(3) Tim Pelaksana Desa secara bersama-sama menatausahakan semua proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD.

(4) Tim Pelaksana Desa mempunyai tugas:
   a. Menyusun rencana penggunaan ADD dengan mengacu pada RPJMDes tahun sebelumnya sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
   b. Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan.
   c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD.
   d. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan fisik.
   e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD secara berkala dan berjenjang kepada Tim Fasilitasi mulai Tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten.

Pasal 6

(1) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten merupakan unsur perangkat Daerah Kabupaten Konawe yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut :
   a. Bupati Konawe sebagai Pembina.
   b. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe sebagai Pengarah.
   c. Kepala BPMPD Kabupaten Konawe sebagai Ketua Tim.
   d. Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPMPD Kab. Konawe sebagai Sekretaris Tim.
   e. Asisten I Bidang Tata Praja sebagai Anggota.
   f. Kepala Inspektorat Kabupaten Konawe sebagai Anggota.
   g. Kepala Bappeda Kab. Konawe sebagai Anggota.
   h. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Anggota.
   i. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Konawe sebagai Anggota.

(2) Tim Fasilitasi Kabupaten mempunyai tugas :
   a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya.
   b. Melaksanakan desiminasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang ADD.
   c. Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
   d. Memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana Desa tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban ADD
   e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Inspektorat Kabupaten Konawe.
   f. Melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian monitoring dan evaluasi serta pengawasan atas pelaksanaan ADD
   g. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

(3) Tim kesekretariatan Kabupaten terdiri dari
   1. Kepala Sekretariat : Sekretaris BPMPD Kab. Konawe
   2. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPMPD Kab. Konawe
   3. Anggota :
      1. Kasubid Keuangan dan Aset Desa BPMPD Kab. Konawe
      2. Kasubid Organisasi dan Kelembagaan Bidang Pemerintahan Desa BPMPD Kab. Konawe
      3. Staf BPMPD Kab. Konawe

(4) Tim kesekretariatan Kabupaten mempunyai tugas :
   a. Melakukan fungsi administrasi umum tentang pelaksanaan ADD.
   b. Melakukan verifikasi proposal ADD.
   c. Memproses rekomendasi pencairan ADD.

(5) Sekretaris Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan desa memimpin Kelompok Kerja Kesekretariatan untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dalam menangani ADD.

(6) Tim Kesekretariatan Kabupaten merupakan Tim monitoring dan Evaluasi serta pengawasan ADD.

(7) Komposisi Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat 6 di tuangkan dalam Surat Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan ADD.

Pasal 7

(1) Tim Fasilitasi Kecamatan merupakan unsur Perangkat Kecamatan yang memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut :
   a. Camat sebagai Ketua Tim.
   b. Kasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (P3MD) sebagai Sekretaris.
   c. Kasi Pemerintahan sebagai Anggota.
   d. Kasi Kesra sebagai Anggota.

(2) Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:
   a. Mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam wilayah kecamatan.
   b. Membantu Tim Pelaksana Desa dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya.
   c. Merekomendasi usulan pencairan ADD dari desa yang telah memenuhi persyaratan.
   d. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD.
   e. Memfasilitasi Tim Pelaksana Desa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ADD.
   f. Melakukan pemantauan / pengendalian terhadap proses kegiatan di Desa yang pembiayaannya bersumber dari ADD.

BAB IV
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

(1) Pengelolaan Kegiatan dan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan secara terbuka melalui Musyawarah rencana pembangunan Desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur mayarakat di Desa.

(2) Arah penggunaan ADD yaitu ADD untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, ADD untuk pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.

(3) Belanja Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diprioritaskan untuk Belanja Penghasilan tetap Kepala Desa, tunjangan perangkat Desa dan Belanja Operasional Pemerintah Desa.

(4) ADD Belanja pembangunan, pemberdayaan Masyarakat bagi Desa yang tidak menerima Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun 2016 (Desa Non APBN) sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pertahun dan ADD Belanja pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat bagi Desa yang mendapatkan Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun 2016 (Desa Penerima dana desa) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pertahun.

(5) ADD Belanja Pembangunan dan Pemberdayaan bagi desa yang ditetapkan sebagai Kampung Perisai diberikan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pertahun.

(6) Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) berdasarkan pada Keputusan Bupati Konawe Nomor ..... Tahun 2015 tentang Penetapan Desa Kampung Perisai.

(7) ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa dan tunjangan diberikan untuk perangkat desa. Insentif diberikan kepada RT, Puutobu desa, imam desa dan guru TPQ dan / atau jabatan lainnya yang menduduki Jabatannya berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang berlaku ditetapkan masing-masing :

1.Kepala Desa	sebesar Rp.	1.700.000,- perbulan;
2.Sekretaris Desa	sebesar Rp.	550.000,- perbulan;
3.Kepala Seksi Pemerintahan	sebesar Rp.	300.000,- perbulan;
4.Kepala Seksi Kesejahteraan	sebesar Rp.	300.000,- perbulan;
5.Kepala Seksi Pelayanan	sebesar Rp.	300.000,- perbulan;
6.Kaur. Tatausaha dan Umum	sebesar Rp.	250.000,- perbulan;
7.Kaur. Keuangan	sebesar Rp.	250.000,- perbulan;
8.Kaur. Perencanaan	sebesar Rp.	250.000,- perbulan;
9. Kepala Dusun I	sebesar Rp.	250.000,- perbulan;
10.Kepala Dusun II	sebesar Rp.	250.000,- perbulan;
11.Kepala Dusun III	sebesar Rp.	250.000,- perbulan;
12.RT 1 Dusun I	sebesar Rp.	200.000,- perbulan;
13.RT 2 Dusun I	sebesar Rp.	200.000,- perbulan;
14.RT 1 Dusun II	sebesar Rp.	200.000,- perbulan;
15.RT 2 Dusun II	sebesar Rp.	200.000,- perbulan;
16.RT 1 Dusun III	sebesar Rp.	200.000,- perbulan;
17.RT 2 Dusun III	sebesar Rp.	200.000,- perbulan;
18.Puutobu Desa	sebesar Rp.	200.000,- perbulan;
19.Guru TPQ	sebesar Rp.	200.000,- perbulan;
20.Imam Desa	sebesar Rp.	200.000,- perbulan;

a. dalam hal Desa yang memiliki Kepala Desa dan atau sekretaris Desa PNS tidak diberikan penghasilan tetap.
b. kepala desa dan atau sekertaris desa PNS sebagai mana huruf a diatas hanya diberikan tunjangan sebesar 50 % dari penghasilan tetap Kepala Desa dan atau sekretaris desa PNS perbulan, dan sebesar 50% dari tunjangan penghasilan tetap Kepala Desa dan atau sekretaris Desa PNS perbulan dialihkan pada belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
c. bendahara Desa diberikan Honorarium sebesar Rp. 150.000,- perbulan.
d. belanja Operasional pemerintahan Desa dan kelembagaan meliputi:
   1. Belanja Operasional Pemerintahan terdiri dari :
      - Biaya pembelian ATK dan penggandaan sebesar Rp. 367.000,- pertahun
   2. Tim Pelaksana Desa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat 2 diberikan tunjangan sebagai berikut :
      - Penanggung Jawab sebesar Rp. 100.000,- pertriwulan;
      - Ketua tim pelaksana Desa sebesar Rp. 100.000,- pertriwulan;
      - Bendahara sebesar Rp. 100.000,- pertriwulan;
      - Anggota (1 Orang) sebesar Rp. 100.000,- pertriwulan;
   3. Belanja Penguatan Kelembagaan Pemerintahan desa digunakan untuk :
      - Biaya Operasional Kelembagaan BPD sebesar Rp.1.500.000,- pertahun
      - Biaya Operasional LPM sebesar Rp.1.500.000,- pertahun
      - Belanja kegiatan PKK Desa sebesar Rp.1.500.000,- pertahun

Pasal 9

(1) ADD yang membiayai Kampung Perisai digunakan untuk belanja pembangunan infrastruktur yang bersifat prioritas dengan berdasarkan potensi di desa tersebut.
(2) Pembangunan kampung perisai diprioritaskan untuk membiayai kegiatan Bedah Rumah dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(3) Pembangunan kampung perisai dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan lainnya apabila kegiatan prioritas bedah rumah sebagaimana ayat 2 telah terpenuhi di desa, maka kegiatan prioritas bedah rumah dialihkan pada kegiatan lainya dengan berdasarkan potensi di desa tersebut yang meliputi :
   a. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana jalan/jembatan, Penyediaan sarana dan prasarana air bersih melalui sistem perpipaan (gravitasi), sumur bor dan sumur gali.
   b. Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi.
   c. Pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani.
   d. Pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah.

(4) ADD untuk Pemberdayaan kegiatan Kampung Perisai tidak diperbolehkan untuk membiayai :
   a. Infrastruktur yang bersinggungan dengan aset kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten serta dana desa lainya.
   b. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah.
   c. Usulan kegiatan tidak boleh tumpang tindih (Over Lapping) dengan jenis kegiatan dibidang lain , baik kegiatan dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan SKPD lingkup Kab. Konawe.
   d. Kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas perlindungan alam pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar alam.

(5) daftar penerima ADD bagi desa kampung perisai masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) ADD untuk Pemberdayaan kegiatan Kampung Perisai tidak diperbolehkan untuk membiayai :
   a. Infrastruktur yang bersinggungan dengan aset kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten serta dana desa lainya.
   b. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah.
   c. Usulan kegiatan tidak boleh tumpang tindih (Over Lapping) dengan jenis kegiatan dibidang lain , baik kegiatan dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan SKPD lingkup Kab. Konawe.
   d. Kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas perlindungan alam pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar alam.

Pasal 10

(1) ADD untuk pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat 4 penggunaanya meliputi Belanja pembangunan sarana dan prasarana di Desa dalam skala kecil (berdasarkan Skala prioritas hasil Musrenbang tingkat Desa).

(2) ADD bagi desa penerima dana desa APBN dan desa Non dana desa APBN untuk pembiyaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat tidak dibenarkan untuk membiayai kegiatan :
   1. Ganti rugi Tanah
   2. Pembangunan Tapal batas Desa
   3. Pembuatan Gapura Desa
   4. Pembuatan Taman
   5. Pembangunan Tugu, Dan
   6. kegiatan pembangunan yang tidak memiliki manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat setempat.

(3) ADD pada kegiatan pemberdayaan masyarakat bagi desa Non dana desa APBN dapat digunakan untuk keperluan belanja Modal untuk menunjang kegiatan Pemerintahan desa dalam hal pelayanan kepada masyarakat bagi kepentingan Desa harus melalui Musyawarah di tingkat Desa dengan persetujuan BPD dan LPM.

(4) Belanja modal yang sumber pembiayaannya berasal dari ADD menjadi milik Pemerintah Desa dan di masukkan kedalam Daftar kekayaan Asset Desa dan di catat dalam Buku Daftar Inventaris Desa.

(5) Penggunaan dana untuk pembiayaan kegiatan pembangunan dalam rangka pemberdayaan masyarakat harus dilengkapi dengan Gambar dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang

BAB V
MEKANISME PERMINTAAN, PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 11

(1) Kepala Desa mengajukan Permohonan Penyaluran Dana untuk ditransfer ke Rekening Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Konawe.

(2) Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam dua tahapan sebagai berikut :
- Tahap I sebesar 50% pada semester I
- Tahap II sebesar 50% pada semester II

(3) Permintaan pencairan Alokasi Dana Desa diajukan kepada Bupati Konawe Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Konawe dengan melampirkan RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, LPPD (laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) serta Rekomendasi dari Camat.

(4) Kepala Desa dalam mengajukan Permohonan Pencairan ADD kepada Bupati Cq Kepala BPMPD Kabupaten Konawe untuk Tahap I (50%) pada Semester I melampirkan :
- Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD Tahun sebelumnya LPJ Tahap II Tahun 2015, dengan melampirkan :
  1. Laporan penggunaan ADD Tahun 2015 (Format 1).
  2. Berita Acara Pemeriksaan Kas (Format 2)
  3. Laporan Triwulan 1,2,3,4 penggunaan ADD tahun 2015 (Format 3)
  4. Bukti Setoran PPN/PPh
- Laporan Penggunaan Dana ADD Tahun 2016
- Peraturan Desa Tentang RPJMDesa
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun sebelumnya.
- Peraturan Desa tentang APBDesa untuk Tahun Anggaran 2016.
- Foto Copy Rekening bendahara Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD).
- Foto Copy KTP Bendahara Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD).
- Foto Copy SK Kepala Desa yang diterbitkan oleh Bupati Konawe
- Foto Copy SK Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
- Foto Copy SK LPM Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
- Foto Copy SK Tim Penggerak PKK Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
- Foto Copy SK BPD Desa yang diterbitkan oleh Bupati Konawe
- Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap penggunaan Anggaran ADD Tahap I bermaterai
- Hasil Verifikasi Tim Fasilitasi Kecamatan (Format 4)

(5) Selanjutnya Desa dalam mengajukan Permohonan Pencairan ADD Tahap ke II (50%) pada Semester ke II melampirkan :
- Laporan Penggunaan ADD Tahap I setelah diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Kecamatan (Format 1).
- Berita Acara Pemeriksaan Kas (Format 2).
- Bukti Setoran PPn/PPh
- Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap penggunaan Anggaran ADD tahap II bermaterai.
- Hasil verifikasi Tim Fasilitasi Kecamatan (Format 5)

(6) Format 1, 2, 3, 4 dan 5 sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan 5 diatur dalam lampiran III dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7) Terhadap setiap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 Tim Kesekratariatan Tingkat Kabupaten melakukan Verifikasi sebagai dasar Penerbitan Usulan Rekomendasi Pencairan Dana.

(8) Pencairan Dana untuk masing-masing Desa hanya dapat dilakukan oleh Bendahara kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan setelah adanya Persetujuan Rekomendasi Tertulis Pencairan ADD dari Kepala BPMPD atas nama Bupati Konawe.

(9) Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sesuai dengan kebutuhan

(10) Dalam pengelolaan ADD bendahara kegiatan memiliki kewenangan fungsional untuk menerima, menyimpan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana ADD.

(11) Alokasi Dana Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan diberikan setiap tahunnya kepada Desa yang selanjutnya dikelola dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

BAB VI
PELAKSANAAN KEGIATAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PAJAK PPN/PPh, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa dilakukan menurut tahapan – tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan meliputi proses pembentukan kelembagaan pengelolaan Alokasi Dana Desa serta kegiatan Sosialisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
2. Tahap Perencanaan.
   a. Kepala Desa mengadakan sosialisasi pelaksanaan ADD dan membentuk Tim Pelaksana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
   b. Tim Pelaksana Desa membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang meliputi Rencana Biaya, Kebutuhan Material serta Kelompok sasaran pada Masyarakat dan lain-lainnya sesuai kebutuhan yang berlaku.
   c. Kepala Desa menuangkan kegiatan yang didanai ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
3. Tahap Pelaksanaan.
   a. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada Masyarakat, Maka pada setiap pelaksanaan Kegiatan berupa pembangunan Fisik wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan.
   b. Papan Informasi kegiatan tersebut sekurang-kurangnya memuat : Nama Kegiatan, Volume Kegiatan, Besaran Anggaran dari ADD maupun Swadaya Masyarakat, dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan.
   c. Kasi P3MD Kecamatan secara aktif melaksanakan pengawasan atas pencairan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penggunaan dana ADD dan hasil pengawasannya dilaporkan kepada Bupati Konawe melalui Kepala Camat
4. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa merupakan tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Desa yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati Konawe melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Konawe.
5. Setiap pengeluaran atau pembayaran yang terkena objek pajak, diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pelaporan.
   a. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa kepada Tim Fasilitasi Kabupaten secara berjenjang.
   b. Laporan Akhir merupakan laporan pelaksanaan secara keseluruhan dengan susunan sebagai berikut :
      - Pendahuluan.
      - Program dan Kegiatan ADD / Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD.
      - Pelaksanaan Penggunaan ADD.
      - Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah.
      - Perkembangan Fisik kegiatan yang dilengkapi dengan Foto kemajuan Fisik 0% s/d 100%.
      - Penutup. Laporan akhir Kepala Desa disampaikan selambat-lambatnya pada minggu Pertama bulan Januari tahun 2017.

c. Bagi kepala desa yang belum memasukan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan ADD Tahap II Tahun Anggaran 2015 tidak akan diproses pencairan dana ADD Tahap I tahun anggaran 2016, dan yang tidak memasukan Laporan pertanggungjawaban / penggunaan Keuangan ADD Tahap I Tahun anggaran 2016 tidak akan diproses pencairan dana ADD Tahap II tahun anggaran 2016.

Pasal 13

Pengawasan atas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh aparat pengawasan Fungsional Pemerintah Kabupaten Konawe.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

(1) Kepala Desa yang tidak dapat memenuhi dan mematuhi peraturan bupati ini baik dari pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan ADD atau dengan sengaja mengunakkan dana ADD dimaksud untuk kepentingan pribadi akan diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
(2) Kepala Desa yang tidak memasukkan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap I dan atau tahap II tahun 2016 tidak akan menerima ADD pada tahun anggaran 2017.
(3) Kepala Desa yang tidak mengurus dan melengkapi kelengkapan Administrasi pencairan ADD sampai pada akhir Tahun anggaran 2016 yang berakibat tidak keluarnya dana ADD desa tersebut dengan alasan apapun juga tidak akan di anggarkan ditahun berikutnya (tidak ada anggaran yang diluncurkan).
(4) Dana ADD yang di maksud pada ayat (3) akan dikembalikan pada kas Negara.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal : 12 februari 2016

BUPATI KONAWE,

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal : 12 februari 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH,

H. RIDWAN L.

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016 NOMOR : 215

RATURAN BUPATI KONAWE NOMOR : ....5..... TAHUN 2016

AN BESARAN ADD BAGI DESA PENERIMA DANA DESA (APBN), DESA NON DANA DESA DAN DESA SEBAGAI KAMPUNG PERISAI T.A 2016

AN ADD BAGI DESA YANG TELAH MENERIMA DANA DESA (APBN) DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

ECAMATAN / DESA		BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2016	RINCIAN PORSI ADD				RINCIAN PEMBAYARAN ADD		KETERANGAN
			PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PENGHASILAN TETAP , TUNJANGAN DAN INSENTIF	OPRASIONAL PEMERINTAH DESA	KELEMBAGAANMASYARAKAT	TAHAP I	TAHAP II	
2		3	4	5	6	7	8	9	10
TA									
SA	WALANDAWE	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	TIRAWONUA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	PARUDONGKA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
OMA									
SA	LATOMA JAYA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	AMBEKAERI UTAMA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	AMBONIKI	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	WAWOLATOMA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	ANDOLUTO	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	LALOWATA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	TITIOWA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
ESA	NESOWI	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
NUA									
SA	NEKUDU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	LASADA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)

2		3	4	5	6	7	8	9	10
SA	ASINUA JAYA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	ANGOHI	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	AWUA JAYA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	AWUA SARI	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
OPIA									
SA	ATOWATU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	WAWORAHA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	SORUE JAYA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	SOROPIA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	TAPULAGA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	SAWAPUDO	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	BOKORI	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	SAPONDA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	MEKAR	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	BAJO INDAH	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	TELAGA BIRU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	LEPPE	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	BAJOE	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
OIALA									
SA	LALIMBUE JAYA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	LABOTOY	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	MUARA SAMPARA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	SAMBARAASI	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)

2		3	4	5	6	7	8	9	10
SA	LAMENDORA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	TANI INDAH	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	PEREOA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	LALIMBUE	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	TOMBAWATU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	LALONGGOMBUNO	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	KAPOIALA BARU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
ONGGASUMEETO									
SA	TOLI TOLI	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	NII TANASA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	RAPAMBINOPAKA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	LALOMBONDA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	PUUWONUA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	BUMI INDAH	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	LOLANGGASUMEETO	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	TOOLAWAWO	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
DOALA									
SA	PEBUNOOHA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	LALONGGALUKU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	DIOLO	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	RUMBIA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	RAMBU KONGGA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	LAOSU JAYA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)

2		3	4	5	6	7	8	9	10
PARA									
SA	ANDEPALI	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	PUULORO	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	TOTOMBE JAYA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	WAWOLIMBUE	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	POLUA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	BAO – BAO	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	POHARA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	ANDAROA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	KONGGAMEA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	ANDADOWI	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	BAENI	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
NGGEDO									
SA	MATABURA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	DUNGGUA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	WAWOHINE	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	ANAHINUNU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	ULU BENUA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	PUASANA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	LALONONA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	WATULAWU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	MENDIKONU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	AMONGGEDO	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)

2		3	4	5	6	7	8	9	10
SA	AMANDETE	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	LALOMBONDA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
UHU									
SA	AHUHU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	WOERAHI	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	LAROWIU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	TUDAMEASO	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
MBUTE									
SA	NAPOOSI	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	TRIMULYA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	MATAIWOI	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	ULU MERAKA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	SILEA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	KUMAPO	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	ULU ONEMBUTE	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	TAWAPANDERE	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
IALA									
SA	LALONGGATU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	PUUSANGI	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	WONUA MOROME	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	SONAI	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	POANAHA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	PURIALA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)

2		3	4	5	6	7	8	9	10
SA	WATUSA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	AHUAWALI	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	UNGGULINO	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	MOKALELEO	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	TETEWATU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	TETEHAKA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	WAWOSANGGULA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	PUUHOPA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
ULUTU									
SA	LALOUMERA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	ULU POHARA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	LABELA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	ASUNDE	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	AMOSILU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	LAWONUA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	SILEA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	ONEMBUTE	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	ANDOMESINGGO	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	PUNGGALUKU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	PUUNDOHU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
KI									
SA	ASOLU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	SAMBEANI	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	PUNGGALUKU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)

2		3	4	5	6	7	8	9	10
SA	WALAY	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	EPEEA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	KUMAPO	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	ARUBIA JAYA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	PADANGGUNI UTAMA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	KASUWARA INDAH	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
IBUYA									
SA	ASAKI	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	WAWORAHA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	AWULITI	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	AMBERI	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	MERAKA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	TANGGOBU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	WONUA HOA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	TETEMBOMUA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
DIDAHA									
SA	AHUAWATU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	WAWOLEMO	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	AMESIU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	HONGOA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	AMBUULANU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	TIRAWUTA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	MUMUNDOWU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	BELATU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)

2		3	4	5	6	7	8	9	10
ESA	PUUMBINISI	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
ESA	WONUA MONAPA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
ESA	LAHONGGUMBI	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
AI									
SA	AMAROA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	RAWUA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	AMERORO	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	ANGGOPIU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	OLO – OLOHO	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	LANGGOMEA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	MATAHOALU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	TAWAROTEBOTA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	TAWAMELEWE	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	BARUGA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	TANGGONDIPO	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
GAUNA									
SA	WAWORODA JAYA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	SANUANGGAMO	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	PUUNDOMBI	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	AMBOPI	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	ASAO	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	MOMEA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)

2		3	4	5	6	7	8	9	10
SA	ULUAO	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	ANDEPOSANDU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	ANGOHU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	ANDALAMBE	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	BAROWILA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
GGEDUKU									
SA	DURIAASI	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	LALOUSU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	BENDEWUTA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	WUKUSAO	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	LALOHAO	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	WAWONGGOLE	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	TETEMOTAHA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	WAWOONE	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	WAWOSOLO	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	LANGGONAWE	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	DAWI – DAWI	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
VOTOBI									
SA	NARIO INDAH	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	KORUMBA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	ANGGOTOA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	ANALAHUMBUTI	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)

2		3	4	5	6	7	8	9	10
AWE									
SA	SANGGONA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	HUDOA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	UELAWU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	UETE	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	MOKOWU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	ASONIWOWO	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
DANGGUNI									
SA	PADANGGUNI	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	ALOSIKA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	LANGGEA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	SAMBAOSU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	ALEUTI	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	PADANG MEKAR	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	MATANGGORAI	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	MEKAR JAYA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	GARUDA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	ATODOPI	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
ROSI									
SA	BESU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	PAKU JAYA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	PAKU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)

2		3	4	5	6	7	8	9	10
SA	MENDIKONU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	MOROSI	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	PUURUY	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	WONUA MORINI	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	TONDOWATU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	TANGGOBU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
GALOMOARE									
SA	ANGGALOMOARE	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	ABELISAWAH	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	LAKOMEA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	GALU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	PUUSANGI	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	LASOSO	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
GGEDUKU BARAT									
SA	BARUGA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	LAHOTUTU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	LAMBANGI	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	WATURAI	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	KASUKIA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	PUDAY	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SA	TETEONA	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	WONGGEDUKU	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
SA	LINONGGASAI	89,167,000	3,500,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	44,583,500	44,583,500	PENERIMA DD (APBN)
	Sub. Total	**19,616,740,000**	**759,500,000**	**16,795,800,000**	**817,439,000**	**976,500,000**	**9,674,619,500**	**9,674,619,500**	

BUPATI KONAWE

KERY SAIFUL KONGGOASA

PARAF KOORDINASI

	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN ...	
3	DINAS / BADAN / KANTOR	
4	BAGIAN ..Hukum.....	

AN LAMPIRAN I ALOKASI DANA DESA BAGI DESA NON PENERIMA DANA DESA (APBN) DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

ECAMATAN / DESA		BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2016	RINCIAN PORSI ADD				RINCIAN PEMBAYARAN ADD		KETERANGAN
			PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PENGHASILAN TETAP , TUNJANGAN DAN INSENTIF PERANGKAT	OPRASIONAL PEMERINTAH DESA	KELEMBAGAANMASYARAKAT	TAHAP I	TAHAP II	
2		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
TA									
SA	PUUWIWIRANO	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)
SA	TANGGOLA	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)
SA	WIALI	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)
OMA									
SA	NAPOOAHA	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)
SA	AROMBU UTAMA	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)
SA	ANGONGA	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)
OIALA									
SA	LABOTOY JAYA	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)
ONGGASUMEETO									
SA	WATUNGGARANDU	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)
SA	BATU GONG	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)
DOALA									
SA	LALONGGALUKU TIMUR	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)

2		3	4	5	6	7	8	9	10
LUHU									
SA	AHULOA	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)
SA	SAMBASULE	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)
SA	LALOPISI	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)
MBUTE									
SA	ANA ONEMBUTE	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)
SA	ANGGALOOSI	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)
ULUTU									
SA	PUULOWARU	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)
SA	WAWORAHA	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)
KI									
SA	UNAASI JAYA	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)
DIDAHA									
SA	LALOIKA	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)
SA	LALONGGOTOMI	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)
SA	LALODANGGE	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)
SA	WONUA MANDARA	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)
SA	SULEMANDARA	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)

2		3	4	5	6	7	8	9	10
AI									
SA	TAMESANDI	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)
SA	HUMBOTO	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)
SA	MOOREHE	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)
SA	ANGGAWO	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)
SA	KASAEDA	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)
SA	PANGGULAWU	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)
GAUNA									
SA	OLO ONUA	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)
SA	NAMBEABORU	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)
SA	AMBEPULU	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)
NGGEDUKU									
SA	POLANDANGI	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)
SA	ANGGORO	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)
WOTOBI									
SA	KASUMEWUHO	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)
SA	KUKULURI	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)
GALOMOARE									
SA	ANGGALOMOARE JAYA	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)
SA	ANDABEU JAYA	98,667,000	13,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	49,333,500	49,333,500	DESA NON DD (APBN)

	3	4	5	6	7	8	9	10
LUHU								
MELAY	235,667,000	150,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	117,833,500	117,833,500	KAMPUNG PERISAI
MBUTE								
UMEIA	235,667,000	150,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	117,833,500	117,833,500	KAMPUNG PERISAI
IALA								
ONAHA	235,667,000	150,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	117,833,500	117,833,500	KAMPUNG PERISAI
ULUTU								
OMOLUA	235,667,000	150,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	117,833,500	117,833,500	KAMPUNG PERISAI
KI								
GGORO	235,667,000	150,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	117,833,500	117,833,500	KAMPUNG PERISAI
IBUYA								
TAREMA	235,667,000	150,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	117,833,500	117,833,500	KAMPUNG PERISAI
DIDAHA								
WALAHAMBUTI	235,667,000	150,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	117,833,500	117,833,500	KAMPUNG PERISAI
AI								
RODA JAYA	235,667,000	150,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	117,833,500	117,833,500	KAMPUNG PERISAI
GAUNA								
ONGGOUNA	235,667,000	150,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	117,833,500	117,833,500	KAMPUNG PERISAI
NGGEDUKU								
VAROLONDO	235,667,000	150,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	117,833,500	117,833,500	KAMPUNG PERISAI
VOTOBI								
ANDU	235,667,000	150,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	117,833,500	117,833,500	KAMPUNG PERISAI

	3	4	5	6	7	8	9	10
AWE								
NUAMBAE	235,667,000	150,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	117,833,500	117,833,500	KAMPUNG PERISAI
DANGGUNI								
TAHORI	235,667,000	150,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	117,833,500	117,833,500	KAMPUNG PERISAI
ROSI								
ARA	235,667,000	150,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	117,833,500	117,833,500	KAMPUNG PERISAI
GALOMOARE								
ANGGELE	235,667,000	150,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	117,833,500	117,833,500	KAMPUNG PERISAI
NGGEDUKU BARAT								
MOKUNI	235,667,000	150,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	117,833,500	117,833,500	KAMPUNG PERISAI
ONGGEDO								
I	235,667,000	150,000,000	77,400,000	3,767,000	4,500,000	117,833,500	117,833,500	KAMPUNG PERISAI
Sub. Total	6,127,342,000	3,600,000,000	1,857,600,000	90,408,000	108,000,000	2,828,004,008	2,828,004,000	

BUPATI KONAWE

KERY SAIFUL KONGGOASA

PARAF KOORDINASI		
	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN ...	
3	DINAS / BADAN / KANTOR	
4	BAGIAN Hukum	

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR ...5.....2016

PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN KEGIATAN BEDAH RUMAH PROGRAM KAMPUNG PERISAI TAHUN 2016 :

1. Berdomisili dilokasi yang mendapatkan Anggaran Dana Desa (ADD) Program Kampung Perisai, dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan domisili dari kepala desa.
2. Tanah tempat berdiri rumah yang akan dibedah berstatus milik sendiri yang dibuktikan dengan foto copy sertifikat hak atas tanah / surat alas hak lainnya atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa (format terlampir)
3. Memiliki rumah yang tidak layak huni, Komponen rumah yang akan dibedah adalah komponen rumah yang rusak. Jenis kerusakan adalah sebagai berikut :
   i. Rusak Ringan (salah satu dari tiga komponen atap, lantai dan dinding rusak atau tidak layak);
   ii. Rusak Sedang (dua di antara tiga komponen atap, lantai dan dinding rusak atau tidak layak);
   iii. Rusak Berat (ketiga komponen atap, lantai, dan dinding rusak atau tidak layak seluruhnya).
4. Belum pernah mendapat bantuan dana hibah perumahan, baik dari APBN, APBD Propinsi atau APBD Kabupaten.
5. Pemilik rumah yang akan dibedah bukan dari PNS, TNI/Polri, atau masyakarat yang berpenghasilan cukup setiap bulan atau dianggap mampu.
6. Penetapan rumah yang akan dibedah harus mealalui musyawarah yang terdiri dari unsur masyarakat di desa kemudian dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat untuk disetujui dan ditetapkan melalui keputusan Kepala desa.
7. Besaran anggaran untuk bedah rumah maksimal Rp. 15.000.000/Unit (Lima belas juta per unit), disesuaikan dengan keadaan fisik rumah menyangkut ketidaklayakan komponen rumah (atap, lantai dan dinding) serta dikaitkan dengan jenis kerusakan (ringan, sedang dan berat).

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Umur : ..... tahun

Pekerjaan : .....

Alamat :

Jl. : .....

RT. ...../RW. .....

Desa : .....

Kecamatan : .....

Dengan ini menyatakan :

1. Belum pernah menerima bantuan dana hibah perumahan, baik dari APBN, APBD Propinsi atau APBD Kabupaten;
2. Tanah yang dikuasai merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi.
3. Memiliki satu-satunya rumah yang tidak layak huni.

Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia mengembalikan dana bantuan yang telah saya terima ke Kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

....., ... 2016

Yang menyatakan

(Nama & Tanda Tangan Penerima Bantuan)

KOP SURAT DESA

SURAT KETERANGAN TANAH

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa ....., Kecamatan ..... Kabupaten Konawe menerangkan bahwa :

Nama :

Umur : ..... Thn

Alamat : RT...../ RW. ..... Desa .....Kecamatan .....

Pekerjaan :

Bahwa nama tersebut di atas benar bertempat tinggal di Desa ..... ini dan memiliki sebidang tanah sesuai dengan alamat tersebut di atas seluas : ..... m^2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan .....

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan .....

Sebelah Timur : Berbatasan dengan .....

Sebelah Barat : Berbatasan dengan .....

Tanah tersebut terdaftar dalam buku register tanah desa ..... dengan nomor SPPT .....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan benar sesuai dengan sumpah jabatan.

Di keluarkan di : .....

Pada Tanggal : 2016

Kepala Desa .....

(NAMA KEPALA DESA)

BUPATI KONAWE

KERY SAIFUL KONGGOASA

N III PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR : .....5.....TAHUN 2016

Contoh Blanko Laporan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

LAPORAN PENGGUNAAN DANA ADD TAHUN ANGGARAN 20..

DESA.....KECAMATAN.....

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		SPJ (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)
		TAHAP I	TAHAP II		
2	3	4	5	6	7
hasilan Tetap Kepala Desa					
aya Penghasilan tetap Kepala Desa					
t..					
angan Perangkat Desa					
njangan Kepala Desa (PNS)					
njangan Perangkat Desa dan atau sebutan lainnya..					
t...					
orarium					
m Pelaksana Desa					
nor Bendahara Desa					
t....					
rasional Lembaga Desa					
aya Operasional Pemerintah Desa					
TK					
bangunan / pemberdayaan Masyarakat					
t...					
JUMLAH (100 %)					

diperiksa oleh :
Ketua Tim Pelaksana Desa

.....

.....,20.....
Bendahara Desa

.....

Mengetahui / Menyetujui
Kepala Desa .....

.....

Form. 2 : Contoh Blanco Berita Acara Pemeriksaan Kas

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini .....tanggal.....bulan.....tahun.....
Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....
Jabatan: Kepala Desa.....
Keterangan : Ditunjukkan sebagai penanggung jawab Tim Pelaksana Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa .....
Nomor.....Tanggal.....

Telah melakukan Pemeriksaan kepada :

Nama : .....
Jabatan: Bendahara Tim Pelaksana Desa
Keterangan : Ditunjukkan sebagai Bendahara Tim Pelaksana Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa .....
Nomor.....Tanggal.....

Dengan hasil sebagai berikut :

- Jumlah uang yang diterima Rp. .....
- Jumlah Uang yang dipertanggungjawabkan Rp. .....

(saldo kas) Rp. .....

Saldo Buku Rp. .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

.....,.....20.....

Yang diperiksa, Yang Memeriksa,

(.....) (.....)

Contoh Blanko Laporan Triwulan I/II/III/IV Penggunaan Dana ADD

LAPORAN TRIWULAN I/II/III/IV PENGGUNAAN DANA ADD TAHUN ANGGARAN .....

DESA.....KECAMATAN.....

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		SPJ (Rp)	
		TAHAP I	TAHAP II	SUDAH	BELUM
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
hasilan Tetap Kepala Desa					
aya Penghasilan tetap Kepala Desa					
t..					
angan Kepala desa / Perangkat Desa					
njangan Kepala Desa (PNS)					
njangan Perangkat Desa dan atau sebutan lainnya..					
t...					
orarium					
n Pelaksana Desa					
nor Bendahara Desa					
t....					
rasional Lembaga Desa					
aya Operasional Pemerintah Desa					
TK					
t....					
bangunan / Pemberdayaan Masyarakat					
t...					
JUMLAH (100 %)					

diperiksa oleh :
Ketua Tim Pelaksana Desa

.....

.....,20.....
Bendahara Desa

.....

Mengetahui / Menyetujui

Form. 4 : Contoh Blanco Format Verivikasi Permohonan ADD

VERIFIKASI PERMOHONAN ADD TAHUN ANGGARAN .....

Kecamatan : .....
Desa : .....
Tahap : I (satu)

Ceklist Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan ADD

NO.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		
		ADA		TIDAK ADA
		SESUAI KETENTUAN	TIDAK SESUAI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Laporan Pertanggung Jawaban ADD Tahun 2015 yang dilampirkan : - Laporan Penggunaan ADD Tahun 2015 (Form. 1) - Berita Acara Pemeriksaan Kas (Form. 2) - Laporan Triwulan 1,2,3 dan 4 (Form.3)			
2	Laporan Penggunaan ADD			
3	Peraturan Desa Tentang RPJMDesa			
4	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun sebelumnya			
5	Peraturan Desa tentang APBDesa untuk Tahun Anggaran 2016			
6	Foto Copy Rekening bendahara Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD).			
7	Foto Copy KTP Bendahara Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD).			
8	Foto Copy SK Kepala Desa yang diterbitkan oleh Bupati Konawe			
9	Foto Copy SK Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.			
10	Foto Copy SK Tim Penggerak PKK Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.			
11	Foto Copy SK BPD Desa yang diterbitkan oleh Bupati Konawe			
12	Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap penggunaan Anggaran ADD Tahap I bermaterai			

Berdasarkan Verifikasi Tim Fasilitasi Kecamatan ....., maka permohonan pencairan ADD Tahap II Tahun Anggaran ..... Desa.....:

a. LAYAK atau MEMENUHI SYARAT.
b. TIDAK LAYAK atau TIDAK MEMENUHI SYARAT dan perlu diperbaiki oleh Desa :
   1. .....;
   2. .....; dan
   3. .....;

.....20.....
Petugas Verifikasi,

.....
NIP. .....

VERIFIKASI PERMOHONAN ADD TAHUN ANGGARAN .....

Kecamatan : .....
Desa : .....
Tahap : II (dua)

Ceklist Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan ADD

NO.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		
		ADA		TIDAK ADA
		SESUAI KETENTUAN	TIDAK SESUAI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Laporan Penggunaan ADD Tahap I (Format 1) setelah diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.			
2	Berita Acara Pemeriksaan Kas (Format 2).			
3	Rekapitulasi penggunaan ADD (Form. 4)			
4	Bukti Setoran PPn/PPh			
5	Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap penggunaan Anggaran ADD tahap II bermaterai.			

Berdasarkan Verifikasi Tim Fasilitasi Kecamatan ....., maka permohonan pencairan ADD Tahap I (satu) Tahun Anggaran ..... Desa.....Kecamatan.....:

c. LAYAK atau MEMENUHI SYARAT.
d. TIDAK LAYAK atau TIDAK MEMENUHI SYARAT dan perlu diperbaiki oleh Desa :
   1. .....;
   2. .....; dan
   3. .....;

.....,....20.....
Petugas Verifikasi,

.....
NIP. .....

Mengetahui,
Camat .....

.....
NIP. .....

BUPATI KONAWE

KERRY SAIFUL KONGGOASA